TELAAH TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAAG VAN RECHT VERVOLGING) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Reza Noor Ihsan
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
rezaihsan62@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

Abstract

Decisions in corruption cases consist of sentencing decisions, acquittal decisions (vrijspraak) and decision is free from all lawsuits (onslaag van rechtvervolging). This study aims to determine the implementation and juridical implications of the decision is free from all lawsuits (onslaag van recht vervolging) in case of corruption. The normative research method used in reviewing decisions free from all lawsuits (onslaag van recht vervolging) in cases criminal acts of corruption.

The results of this study on the implementation of the decision is free from all lawsuits (onslaag van rechtvervolging) in cases of criminal acts of corruption is a necessity as long as the act is administrative in nature and does not enter the realm of criminal law so that it is not criminal responsibility but administrative responsibility with juridical implications the defendant is released from all lawsuits (onslaag van recht vervolging) in cases of corruption.

Keywords: Corruption; Administrastive; Onslaag

Abstrak

Putusan dalam perkara tindak pidana korupsi terdiri dari putusan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*). Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui implementasi serta implikasi yuridis daripada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechtvervolging*) pada perkara tindak pidana korupsi. Adapun metode penelitian normatif yang digunakan dalam mengkaji dan menelaah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) pada perkara tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini terhadap implementasi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) pada perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan selama perbuatan tersebut bersifat administratif dan tidak memasuki ranah hokum pidana sehingga bukan pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban administrative dengan implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) pada perkara tindak pidana korupsi

Kata kunci : Korupsi; Administratif; Putus lepas

I. *Pendahuluan*

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah perbuatan tercela, yang mana dapat diartikan sebagai perbuatan buruk, bejad, menyimpang dari kesucian (Surachmin dan Cahaya Suhandi, 2011). Perbuatan korupsi dikategorikan sebagai *white collar crime* hal ini tidak lepas dari kacamata pelaku kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan dan wewenang yang melekat pada dirinya.

Perbuatan korupsi juga identik dikenal dengan istilah *extra ordinary crime*. Penyebutan istilah *extra ordinary crime* terhadap tindak pidana korupsi tentunya tidak memiliki dasar hukum yang mengikat. Istilah kejahatan yang menyebutkan istilah *extra ordinary crime* pada dasarnya merupakan kesepakatan bersifat diakui secara internasional yang tertuang dalam Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dengan menggolongkan kejahatan, antara lain (Elsam, 2014) :

1. Genosida;
2. Kejahatan Kemanusiaan;
3. Kejahatan Perang; dan
4. Kejahatan Agresi.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* ditinjau dari sudut pandang kajian

viktimologi dan kriminologi. Pada sisi viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari dan menitik beratkan korban. Korban daripada tindak pidana korupsi ini adalah masyarakat umum, sedangkan pada sisi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan berdasarkan kejahatan dan pelaku tindak kriminal.

Perbuatan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai semua perbuatan yang memalukan (*All Embracing act*) dalam rangka untuk mencapai semua tujuan (*All Purposing Act*) yang berfungsi sebagai sarang laba-laba bagi perbuatan yang tidak kriminalitas sifatnya. Hal ini memiliki implikasi hukum dari sisi pidana digolongkan sebagai premum remidium. Oleh karena itu Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis pemidanaan secara tidak langsung dapat ditinjau dari teori retributive murni yang mengharapkan pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan.

Sejatinya eksistensi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ialah mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh setiap orang maupun korporasi sebagaimana subjek hukum yang diatur dalam hukum pidana. Pengadilan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum yang memberikan ruang untuk keadilan melalui mekanisme perkara hukum pidana formil guna memperoleh kebenaran materiil (Narendra et al., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Kehakiman et al., 2009), memberikan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak hanya berorientasi pada sisi normative saja, akantetapi hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masalah selanjutnya muncul adalah sebagai akibat adanya kondisi tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan persepsi dikalangan

masyarakat yang tumbuhkan pada tingkat hakim yang mengadili dapat menimbulkan disparitas (Anggraeny, 2016). Meninjau kembali putusan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechtvervolging*), dimana majelis hakim memuat beberapa pertimbangan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mengukur dan kriteria yang harus dipenuhi ketika putusan majelis hakim dijatuhkan, selain sebagai sebuah kepastian hukum juga berorientasi pada kemanfaatan yang memiliki dampak akan keadilan apabila ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. Menarik dikaji pada penelitian ini dikarenakan adanya kesalahan administrative sehingga memberikan implikasi yuridis yang kontradiktif dengan paradigma pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi sebagai sebuah gambaran riil terhadap penerapan dari pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan dengan bersandar pada putusan yang dikaitkan dengan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga memberikan gambaran yang riil terkait dengan vonis lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) serta implikasi yuridisnya.

III. Pembahasan

A. Bentuk dan Tipologi Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luarbiasa, dimana pelakunya tidak hanya terfokus pada pejabat negara, penyelenggara negara,

akan tetapi merambah pada setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku daripada tindak pidana korupsi ini.

Pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh negara menggunakan sarana *penal* yang berorientasi pada undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut tindak pidana korupsi di klasifikasikan berdasarkan bentuk dan tipologi, antara lain sebagai berikut (Korupsi, 2006):

- 1) **Kerugian keuangan Negara** terdapat dalam Pasal 2 yang mengatur terkait melawan hukumnya suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara, Pasal 3 mengenai penyalahgunaan kewenangan guna menguntungkan diri sendiri, dan dapat merugikan keuangan negara.
- 2) **Suap-menyuap** memuat 5 Pasal yang mengatur larangan tindak pidana korupsi, diantaranya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b mengenai menyuap pegawai negeri, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b mengenai pegawai negeri yang menerima suap, Pasal 11 menitik beratkan tindak pidana korupsi bagi pegawai negeri yang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan korupsi dalam melakukan suap terhadap hakim, Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai suap menyuap advokat, Pasal 6 ayat (2) mengenai hakim dan advokat yang menerima suap, Pasal 12 huruf c menitik beratkan pada hakim yang menerima suap dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkaranya, Pasal 12 huruf d menitik beratkan pada advokat yang menerima suap berkaitan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berkaitan dengan perkara yang diadili di pengadilan.

- 3) **Penggelapan dalam jabatan** antara lain diatur dalam 3 Pasal, yakni Pasal 8 mengenai pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, Pasal 9 mengatur mengenai pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, Pasal 10 huruf a mengatur tentang pegawai negeri yang merusakkan bukti, Pasal 10 huruf b mengenai pegawai negeri yang membiarkan orang lain merusakkan bukti, Pasal 10 huruf c tentang pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
- 4) **Pemerasan** dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf g yang menitikberatkan bagi pegawai negeri yang melakukan pemerasan, Pasal 12 huruf f mengenai pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.
- 5) **Perbuatan curang** diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a melarang pemborong yang berbuat curang, Pasal 7 ayat (1) huruf b mengenai pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang, Pasal 7 ayat (1) huruf c mengenai rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) berbuat curang, Pasal 7 ayat (1) huruf d mengenai pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) berbuat curang, Pasal 7 ayat (2) berkenaan dengan penerima barang Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) yang membiarkan perbuatan curang, Pasal 12 huruf h berkenaan dengan pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
- 6) **Benturan kepentingan dalam pengadaan** diatur dalam Pasal 12 huruf I yang mengatur pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

- 7) **Gratifikasi** diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur bagi pegawai negeri sipil menerima gratifikasi dan tidak lapor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*Onslaag Van Recht Vervolging*)

Hakim ketika menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) terhadap terdakwa pada dasarnya tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan yang tentunya bersifat yuridis maupun bersifat non yuridis. Hal ini tentunya tidak lepas dari pandangan progresifitas dan responsifitas hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi (Mawey, 2016).

Adanya alasan penghapusan pidana yang berupa alasan pembenar. Alasan pembenar menurut Moeljatno (Moeljatno, 2002), yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Menurut Chairul Huda (Huda, 2008), alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum.

Alasan pembenar menitikberatkan kepada unsur objektif, dimana unsur objektif tersebut merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang benar dan patut yang akibat hukumnya adalah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*).

Alasan pembenar dapat diterapkan ketika suatu perbuatan yang walaupun merupakan perbuatan melawan hukum, namun terhadap hal-hal yang sifatnya mendesak dan darurat, maka perbuatan tersebut akan kehilangan sifat melawan hukumnya karena perbuatan tersebut dibenarkan ketika seseorang tidak mempunyai pilihan untuk melakukan suatu perbuatan tersebut

yang secara sadar patut diketahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan adanya alasan pembenar berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum.

Adapun kriteria pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*), antara lain: Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana (Huda, 2008).

Berdasarkan yurisprudensi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966 dengan terdakwa Machroes Effendi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Kr/1973, tanggal 30 Maret 1977 dengan terdakwa Ir. Moch Otjo Dana atmadja, adapun yang menjadi pertimbangannya antara lain (Wiyono, 2008):

1. Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa,
2. Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh terdakwa dan
3. Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat.

C. Implikasi Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*Onslaag Van Recht Vervolging*)

Setiap putusan dari perkara pidana dalam konteks tindak pidana korupsi tentunya memiliki implikasi yuridis tersendiri sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun macam-macam putusan dalam perkara pidana secara spesifik dalam tindak pidana korupsi sehingga memiliki implikasi yuridis, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang pada dasarnya menjatuhkan nestapa/hukuman pemidanaan bagi terdakwa yang tiada lain

berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan kepadanya.

Hakim bebas dalam menjatuhkan berat – ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa. Undang – Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 12 KUHP.

Adapun yang menjadi kriteria dalam putusan/vonis pemidanaan yaitu:

- a) Seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;
- b) Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana;
- c) Tidak adanya unsur penghapus pidana dalam perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang turut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;
- b) Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- c) Terdakwa merupakan residivis.

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif;
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- c) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- d) Terdakwa belum pernah dihukum.

Implikasi yuridis dari putusan pemidanaan adalah seorang terdakwa dipaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atas apa yang telah dilakukannya dengan bersandar pada hukuman baik pidana mati, pidana

penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta pidana tutupan sebagai hukuman pokok (Timbuleng, 2020). Dengan demikian tidak menutup kemungkinan untuk dikenakan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas sendiri berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Jadi dengan adanya putusan bebas berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan dengan kata lain terdakwa tidak dipidana.

Dalam menjatuhkan putusan/vonis bebas (*vrijspraak*) dalam hal tindak pidana korupsi tentu saja bermula pada pertimbangan hakim yang pada umumnya bersandar pada fakta-fakta persidangan serta keyakinan hakim sendiri dalam pembuktiannya.

Pertimbangan dalam putusan bebas (*vrijspraak*) hakim biasanya bersandar pada analisa hakim, fakta-fakta persidangan serta keyakinan dari diri hakim sendiri juga yurisprudensi yang ada.

Adapun kriteria hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) antara lain:

- a) Penilaian hakim terhadap kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dikarenakan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan atau menurut hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa. Adapun alat bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan pasal 184 ayat (1), baik berupa (Harahap, 1988):

- 1) Keterangan saksi,
- 2) Keterangan ahli,
- 3) Surat,
- 4) Petunjuk

Petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diperoleh dari informasi dan dokumen sebagai bentuk perluasan untuk menemukan bukti petunjuk.

- 5) Keterangan terdakwa.
- b) Salah satu unsur atau seluruh unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti.

Implikasi yuridis dari putusan bebas (*vrijspraak*) adalah seorang terdakwa harus dibebaskan dari segala bentuk hukuman/nestapa yang sebelumnya diancamkan oleh negara di sangkakan telah melakukan tindak pidana tidak terbukti, baik salah satu unsure pasal ataupun keseluruhan unsur pasal tidak terbukti.

3. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Sebagaimana pertimbangan hukum hakim yang telah peneliti ungkapkan pada pembahasan sebelumnya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) pada dasarnya tidak lepas dari terbuktinya seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi hanya bersifat kesalahan administrasi saja sehingga dalam persepsi pidana maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai bagian dari pada alas an penghapus

pidana dengan adanya alasan pemaaf ditinjau dalam perspektif tindak pidana korupsi maka implikasi yuridisnya terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian pada prinsipnya kriteria yang mendasari putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdiri dari tidak adanya kerugian negara, terdakwa tidak diuntungkan dan kepentingan umum terlayani. Dengan terakomodirnya tiga kriteria ini maka dapat menjadi landasan hukum di jatuhkan vonis lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*). Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka implikasi yuridis yang muncul apabila dijatuhkan putusan tersebut maka akan mengajukan upaya hukum kasasi untuk pemeriksaan *judex juris*.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penanganan tindak pidana korupsi memerlukan cara yang ekstra, akan tetapi semua harus dilihat dari kasus per kasus, serta tetap memperhatikan kekuasaan kehakiman, dimana hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak hanya berorientasi pada sisi normative saja, akan tetapi hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) haruslah memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:
 - a) Tidak ada kerugian negara;
 - b) Terdakwa tidak mendapatkan untung, dan
 - c) Kepentingan umum terlayani.

3. Bahwa implikasi yuridis dari adanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) pada dasarnya tidak lepas dari terbuktinya seluruh unsure pasal yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi hanya bersifat kesalahan administrasi saja *dan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) akibat dari adanya putusan ini akan mengajukan upaya hokum kasasi untuk pemeriksaan judex juris.*

Daftar Pustaka

- Anggraeny, K. D. (2016). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman*. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 225. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5469>
- Elsam. (2014). *Statuta Roma; Mahkamah Pidana Internasional*. 26 September. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/>
- Harahap, M. Y. (1988). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,. Pustaka Kartini.
- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Group.
- Kehakiman, K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2009). www.legalitas.org.
- Korupsi, K. P. (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mawey, A. G. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. *Lex Crimen*, Vol. V, No(2), 87.
- Moeljatno. (2002). *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Narendra, A. A. G. W., Suryawan, I. G. B., & Widyantera, I. M. M. (2020). *Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 243–250. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2595.243-250>
- Surachmin dan Cahaya Suhandi. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi*. Sinar Grafika.
- Timbuleng, A. E. J. (2020). *Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-*

Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 25(1), 1–9.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034>
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711>
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf>

Wiyono, R. (2008). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Sinar Grafika*.